

Padang Ekspres



ISSN 1829-8214
SENIN ■ 14 JANUARI 2019 ■ 8 Jumadil Awal 1440 H

Koran Nasional dari Sumbar



TERAS UTAMA

Berharap Literasi Kebijakan Kesehatan Caleg

LITERASI (*literacy*) secara sederhana berarti kemampuan membaca dan menulis, namun secara lebih luas literasi adalah kapasitas dalam mengerti dan memahami sebuah persoalan sehingga mampu memberikan kontribusi. Oleh karena itu, literasi dibutuhkan oleh setiap orang sesuai dengan posisi dan amanah yang diembannya. Sehingga, berkembanglah berbagai terminologi literasi.



Hardisman

Ketua Prodi MKes & MARS
Fakultas Kedokteran Unand

Pada bidang kesehatan, bagi masyarakat umum hanya butuh apa yang disebut sebagai literasi kesehatan, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan layanan kesehatan bagi kesehatan individunya.

► Baca *Berharap...* Hal 7

Masyarakat harus paham mana perilaku yang berisiko terhadap kesehatannya dan mana yang positif. Artinya, literasi kesehatan bagi masyarakat umum adalah paham tentang perilaku pencegahan penyakit secara umum pula. Lalu, jika dalam keadaan sakit, mereka juga harus mengerti ke mana mereka meminta pertolongan.

Bagi pemangku kebijakan, khususnya anggota legislatif yang akan membuat regulasi, yang di antaranya akan berkaitan dengan kebijakan kesehatan harus mempunyai literasi yang setingkat lebih tinggi, yang kita sebut sebagai literasi kebijakan kesehatan. Literasi kebijakan kesehatan adalah turunan dari literasi politik dan kebijakan (*political literacy*). Literasi politik dan kebijakan adalah pengetahuan dan pemahaman bagaimana sistem pemerintahan, struktur perundang-undangan, peranan dan kedudukan kelembagaan, pemahaman akan hak dan tanggung jawab warga negara dan pelaksana negara, serta kontekstualnya. Sehingga, secara spesifik literasi kebijakan kesehatan adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi terkait pelayanan kesehatan dan kontekstual penerapannya.

Kita sudah mafhum, bahwa tahun 2019 ini adalah tahun politik. Pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) akan dilaksanakan bulan April ini. Sejak akhir tahun yang lalu hingga kini makin terdengar riuhnya pra-kampanye para kandidat, terutama para calon anggota legislatif (caleg). Berbagai upaya mereka lakukan untuk meningkatkan simpati masyarakat, mulai dari baliho dan spanduk yang *'eye catching'* sehingga orang bisa kenal dan ingat dengan mereka. Mereka di antaranya juga melakukan kegiatan lapangan berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk-bentuk memperkenalkan diri dan pra-kampanye yang sering dilakukan para caleg tersebut adalah dengan memberikan dana atau mensponsori berbagai kegiatan masyarakat dan kepemudaan. Sebut saja misalnya sponsor pemberi hadiah utama hingga pelaksana tunggal berbagai turnamen olahraga dan keg-

iatan musik di kalangan remaja. Tidak kalah seringnya yang dilakukan para caleg adalah dengan memberikan pengobatan massal kepada masyarakat dan khitanan kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian dan memperkenalkan diri.

Sayangnya, sebagian kegiatan yang dilakukan para caleg di lapangan masih banyak yang hanya sebatas menarik simpati dan mencari suara. Khususnya di di bidang kesehatan, yang mereka lakukan baru ingin memperlihatkan bahwa mereka peduli, meskipun sebenarnya hanya pada satu momen saja. Kita menginginkan dan berharap sebenarnya adalah para caleg memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi masyarakat khususnya tentang kesehatan itu, termasuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang sistem kesehatan yang ada.

Agar bisa melakukan itu, tentu para caleg kita berharap tidak hanya mempunyai literasi kesehatan yang baik, tetapi juga literasi kebijakan kesehatan yang memadai. Jika literasi kebijakan kesehatan tidak dimiliki oleh para caleg, maka wajar jika kita sering mendengar slogan-slogan yang mereka sampaikan di masyarakat untuk menarik simpati dan suara, dengan menjual isu-isu kesehatan yang ternyata tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Misalnya menjual isu-isu akan diperjuangkannya pengobatan dan persalinan gratis, akan mengadakan layanan dokter spesialis di tingkat nagari, atau menjanjikan akses langsung layanan rumah sakit bagi masyarakat, dan lainnya. Padahal, konteks saat ini negara kita sudah menerakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang cakupannya sudah mencapai lebih 80% penduduk, adanya sistem *manage care* dengan sistem rujukan, adanya regulasi profesional penempatan tenaga kesehatan dan lainnya yang terkait standar etika dan profesinya, yang secara umum sedapatnya diketahui oleh caleg yang mengangkat isu-isu kesehatan.

Dalam hal ini kita tidak berharap muluk, bahwa para caleg tahu detail tentang semua regulasi kesehatan. Kita juga bukan menuntut para caleg menjadi seorang yang paham tentang masalah ke-

sehatan seperti seorang penyuluh kesehatan, karena bidang ilmu dan latar belakangnya yang berbeda. Namun sesungguhnya kita harapkan adalah pemahaman mereka tentang kontekstual sistem kesehatan yang berkembang saat ini di negara kita ini.

Paling tidak jika ingin mengangkat isu-isu kesehatan, kita berharap para caleg paham prinsip dasar yang ada pada Undang-Undang tentang Kesehatan (UU No 36 Tahun 2009), Undang-Undang Rumah Sakit (UU 44 Tahun 2009), Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No 40 Tahun 2004), Undang-Undang tentang BPJS (UU No 24 Tahun 2011), dan lainnya. Serta khusus bagi caleg daerah, kita juga berharap mereka memahami arti penting dan kedudukan puskesmas saat ini, serta kedudukan dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan statusnya yang sudah menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah).

Pada skala nasional, pemahaman caleg akan kebijakan kesehatan menunjukkan bahwa mereka punya visi perbaikan sistem yang ada. Kita bisa berkaca pada Hillary Clinton, Barack Obama, anggota Kongres dan Senator di Amerika Serikat. Sebelum naik menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2009, dengan ide yang diusung Obama yang akan meningkatkan cakupan jaminan sosial dan kesehatan untuk lansia dan orang cacat (*medicare*) dan jaminan untuk orang miskin (*medic-aid*) yang nantinya dikenal dengan *Obamacare*; mereka mampu memaparkan ide dengan baik. Mereka banyak memaparkan ide-ide perbaikan sistem kesehatan dalam berbagai pidato dan bentuk tulisan. Bahkan tahun 2006, mereka berhasil menerbitkan artikel *"Making patient safety the centerpiece of medical liability reform"*, di *New England Journal of Medicine* vol 354 No 21, sebuah jurnal ilmiah kedokteran bereputasi, meskipun mereka bukanlah berlatar belakang bidang kesehatan.

Kita tidak berharap setinggi itu, namun kita berharap adanya literasi kebijakan kesehatan yang mencerahkan dan bukan hanya retorik menyenangkan sesaat bagi masyarakat. Semoga. (*)